

Pendidikan Pemilih Berkelanjutan dan Integrasi Literasi Digital dalam Penguatan Demokrasi: Studi Kasus Komunitas Pangudi Luhur Surakarta Pasca Pemilu 2024

Nurul Sutarti¹

¹Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Kristen Teknologi Solo

Email Koresponden: nurul.sutarti@gmail.com

Telp HP:082220023728

ABSTRAK

Program Pendidikan Pemilih Berkelanjutan merupakan inisiatif strategis dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memperkuat demokrasi secara berkesinambungan, bahkan setelah pemilu usai. Kegiatan pengabdian ini menasar komunitas guru, alumni, dan pensiunan Yayasan Pangudi Luhur sebagai agen literasi demokrasi lintas generasi. Narasumber yang juga dosen Teknik Informatika UKTS dan mantan Ketua KPU Surakarta (2018–2023) menyampaikan materi yang memadukan wawasan digital dan pengalaman kepemiluan. Artikel ini menganalisis kegiatan berbasis sosialisasi yang membahas isu polarisasi digital, disinformasi, etika publik yang menurun, serta kurangnya pemahaman terhadap institusi demokrasi. Hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman peserta, terbentuknya kolaborasi, dan munculnya inisiatif literasi politik dan digital. Program ini menjadi model pendidikan pemilih yang kontekstual dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

Kata kunci: Pendidikan pemilih, Literasi digital, Demokrasi, KPU, Komunitas Pangudi Luhur

ABTRACT

The Sustainable Voter Education Program is an initiative of the Indonesian General Election Commission (KPU) aimed at strengthening democratic resilience through continuous civic education beyond electoral cycles. This community engagement activity involved teachers, alumni, and retirees of the Pangudi Luhur Foundation as cross-generational agents of democratic and digital literacy. Facilitated by a lecturer in Informatics Engineering at Solotech University and former Chair of the Surakarta Election Commission (2018–2023), the program integrated experiential electoral governance with perspectives on digital citizenship. Using a socialization-based approach, the program addressed key challenges such as digital polarization, disinformation, declining public ethics, and limited understanding of democratic institutions. The outcomes indicate improved civic awareness, the formation of collaborative networks, and the emergence of community-based initiatives in political and digital literacy. This program demonstrates a contextual and participatory model of voter education relevant to everyday democratic practices.

Keywords: Voter education, Civic engagement, Digital literacy, Democracy, Community empowerment

1.Pendahuluan

Setelah Pemilu 2024, ruang publik Indonesia masih diwarnai tantangan serius yang menghambat kualitas demokrasi, seperti polarisasi politik yang berkepanjangan, maraknya disinformasi digital, dan menurunnya etika komunikasi daring. Penelitian menunjukkan bahwa media sosial memperkuat polarisasi melalui efek echo chambers dan filter bubbles (Aspinall & Mietzner, 2019; Lim, 2020). Hal ini menegaskan bahwa demokrasi tidak cukup hanya dengan pemilu lima tahunan, melainkan perlu dirawat melalui literasi digital, pemikiran kritis, dan dialog publik yang sehat. Komunitas Pangudi Luhur, termasuk guru dan alumni, masih memerlukan penguatan kapasitas dalam menghadapi tantangan informasi digital dan penanaman nilai demokrasi lintas generasi.

Dalam masyarakat demokratis ideal, warga mampu memverifikasi informasi, memahami proses politik secara logis, dan berdiskusi secara etis. Namun, kenyataannya masih terdapat kesenjangan berupa rendahnya literasi digital (Kominfo & Katadata Insight Center, 2022), minimnya pemahaman tentang algoritma media sosial (Pariser, 2011), serta tingginya kerentanan terhadap hoaks politik (Utami, 2020). Kesenjangan ini menuntut intervensi edukatif yang kontekstual dan menyeluruh.

Literatur menunjukkan bahwa pendidikan pemilih berkelanjutan efektif dalam memperkuat demokrasi substantif (Surbakti, 2015; KPU RI, 2019), sementara literasi digital memperkuat ketahanan masyarakat terhadap manipulasi informasi (Hobbs, 2020; West, 2017). Integrasi keduanya terbukti meningkatkan kemampuan berpikir kritis, pengambilan keputusan politik yang rasional, dan etika publik (Nugroho, 2023; Pratama & Anshari, 2021). Pendekatan ini sesuai dengan kebutuhan mitra dan tantangan digital pasca Pemilu 2024.

Komunitas Pangudi Luhur memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda. Tanpa literasi digital dan pemahaman kepemiluan yang memadai, mereka rentan terjebak dalam arus disinformasi dan polarisasi. Oleh karena itu, program ini hadir untuk memperkuat kapasitas kritis komunitas dan membangun ketahanan demokrasi dari akar rumput.

Narasumber kegiatan memiliki latar belakang unik sebagai dosen Teknik Informatika UKTS dan mantan Ketua KPU Surakarta, yang memungkinkan penyampaian materi dengan pendekatan teknis dan praktis. Kombinasi ini memberikan landasan konseptual dan empiris yang kuat bagi kegiatan pengabdian.

Tujuan kegiatan ini meliputi:

- a. Mengintegrasikan pendidikan pemilih berkelanjutan dengan literasi digital untuk memperkuat demokrasi substantif;
- b. Meningkatkan kemampuan komunitas Pangudi Luhur dalam memilah dan memanfaatkan informasi digital secara kritis dan etis;
- c. Menjembatani kesenjangan antara kondisi ideal dan realitas demokrasi digital;
- d. Membangun ketahanan masyarakat terhadap polarisasi, disinformasi, dan manipulasi politik pasca Pemilu 2024.

2. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan program dirancang dengan pendekatan partisipatif dan andragogis, yang menekankan keterlibatan aktif peserta dalam proses pembelajaran. Peserta tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berperan dalam analisis isu, diskusi kritis, dan perumusan rencana aksi demokratis. Pendekatan ini dipilih karena pendidikan pemilih berkelanjutan menuntut metode pembelajaran reflektif yang memungkinkan peserta memahami dinamika politik digital pasca Pemilu 2024 dan mengembangkan kapasitas untuk menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.

Rangkaian Kegiatan:

Kegiatan pengabdian ini terdiri dari tiga tahapan utama:

a. Sesi Sosialisasi Interaktif

Memberikan pemahaman mendalam tentang demokrasi substantif, perilaku pemilih, tantangan polarisasi, serta pentingnya literasi digital dalam menjaga kualitas ruang publik.

b. Forum Diskusi Kelompok (FGD)

Menjadi wadah partisipatif untuk mengidentifikasi tantangan demokrasi di lingkungan peserta, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan degradasi etika digital.

c. Refleksi dan Perumusan Rencana Aksi Komunitas

Menghasilkan strategi tindak lanjut berbasis komunitas, termasuk penguatan literasi digital, dialog antar generasi, dan pengembangan jejaring demokrasi lokal.

Pendekatan bertahap ini memastikan bahwa kegiatan tidak berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi juga mendorong transformasi kesadaran dan komitmen kolektif dalam menjaga demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Profil Peserta:

Peserta kegiatan berasal dari tiga kelompok utama:

- Guru Yayasan Pangudi Luhur Surakarta, yang memiliki peran penting dalam pendidikan karakter dan kewargaan generasi muda.
- Alumni, yang memiliki jejaring sosial luas dan berpotensi menjadi agen perubahan di masyarakat.
- Pensiunan, yang membawa pengalaman sosial panjang dan menjadi penjaga nilai-nilai demokrasi lintas generasi.

Keberagaman ini memungkinkan terjadinya dialog intergenerasional yang memperkaya perspektif dan strategi penguatan demokrasi pascapemilu.



Gambar 1. Kegiatan pelaksanaan

Strategi Penyampaian Materi:

Materi disampaikan dengan metode yang kolaboratif, reflektif, dan aplikatif, melalui:

- Pemaparan berbasis modul resmi Pendidikan Pemilih KPU.
- Studi kasus terkait hoaks politik, disinformasi digital, dan algoritma media sosial.
- Pelatihan literasi digital, termasuk teknik verifikasi informasi dan etika komunikasi daring.
- Berbagi pengalaman langsung dari narasumber yang pernah menjabat sebagai Ketua KPU Kota Surakarta.

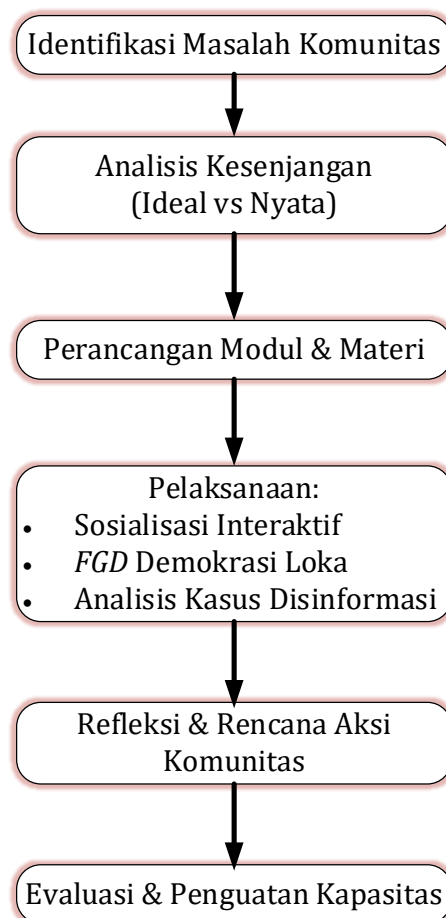
Metode ini dirancang untuk menyesuaikan dengan gaya belajar peserta dan menghubungkan teori dengan praktik nyata.

Fokus Materi:

Materi pelatihan difokuskan pada penguatan kapasitas warga dalam menjaga kualitas demokrasi, mencakup:

- a. Etika publik dan keadaban digital.
- b. Strategi menghadapi disinformasi dan hoaks.
- c. Pemahaman terhadap lembaga demokrasi seperti KPU, Bawaslu, dan DPR.
- d. Pendidikan demokrasi lintas generasi.
- e. Upaya menjaga partisipasi politik setelah pemilu.

Alur Kegiatan adalah sebagai berikut:



Gambar 2 Alur Kegiatan

Tabel 1. Metode Pelaksanaan dan Luaran

Tahap Kegiatan	Metode yang Digunakan	Luaran yang Dihasilkan	Indikator Capaian
Sosialisasi	Paparan, dialog interaktif	Peningkatan pemahaman awal peserta	Peserta memahami konsep demokrasi substantif & literasi digital
FGD	Diskusi terstruktur	Peta masalah komunitas: hoaks, polarisasi, etika digital	Teridentifikasi ≥5 isu dominan demokrasi lokal
Analisis kasus	Studi kasus, simulasi verifikasi fakta	Kemampuan peserta mengidentifikasi hoaks & bias algoritma	Peserta mampu mempraktikkan cek fakta
Refleksi & rencana aksi	Refleksi kritis, coaching	Draft rencana aksi komunitas demokratis	Minimal 1 rencana aksi komunal tersusun
Sharing pengalaman pemilu	Cerita peristiwa (<i>narrative method</i>)	Pemahaman praktis dinamika kepemiluan	Peserta memahami peran lembaga demokrasi

3. Hasil dan Pembahasan

Relevansi Program bagi Masyarakat Demokratis Pasca Pemilu

Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan ini memiliki relevansi strategis dalam konteks sosial-politik pasca Pemilu 2024, di mana polarisasi politik, infodemik, dan penurunan rasa saling percaya menjadi problem utama dalam kehidupan demokratis. Berbagai kajian menunjukkan bahwa kontestasi elektoral di era digital cenderung memperkuat segregasi identitas akibat konsumsi informasi yang terfragmentasi (Muller, 2022; Wahid & Arifianto, 2023). Oleh sebab itu, masyarakat membutuhkan ruang dialog inklusif dan pendidikan demokrasi yang berkelanjutan.

Kelompok sasaran—guru, alumni, dan pensiunan—dipilih karena memiliki pengaruh lintas generasi dan jejaring sosial yang luas. Guru mampu menanamkan nilai demokrasi melalui proses pembelajaran, alumni berperan sebagai jembatan antara dunia pendidikan dan masyarakat, sementara pensiunan membawa pengalaman historis yang memperkaya pemahaman kolektif tentang praktik berdemokrasi (Nurdin, 2021). Melalui kombinasi peran tersebut, kegiatan ini menjadi relevan dalam memperkuat ekosistem warga negara yang literat, kritis, dan berdaya.

Integrasi Perspektif Informatika dan Kepemiluan

a. Perspektif Informatika

Perspektif informatika memberikan kerangka teknis untuk memahami fenomena disinformasi dan polarisasi digital. Narasumber menjelaskan mekanisme algoritma media sosial yang bekerja melalui personalisasi konten, sehingga pengguna cenderung menerima informasi yang memperkuat preferensi dan keyakinan yang sudah dimiliki (Pariser, 2011; Bakshy et al., 2015). Fenomena filter bubble dan echo chamber mendorong terbentuknya ruang-ruang gema yang meminimalkan keberagaman informasi, sekaligus meningkatkan kerentanan terhadap hoaks politik (Guess & Lyons, 2020).

Selain itu, kecepatan penyebaran misinformasi sering kali dipicu oleh desain algoritmik yang memprioritaskan konten viral berbasis emosi, bukan akurasi (Vosoughi et al., 2018). Dengan demikian, pendekatan informatika ini memperluas pemahaman peserta mengenai akar struktural dari disinformasi modern, yang tidak hanya terkait perilaku individu, tetapi juga arsitektur teknologi digital yang mereka gunakan setiap hari.

b. Perspektif Kepemiluan

Pengalaman narasumber sebagai mantan Ketua KPU Kota Surakarta menghadirkan perspektif institusional dan normatif mengenai penyelenggaraan pemilu. Penjelasan mengenai prinsip-prinsip dasar seperti independensi, integritas, akuntabilitas, dan profesionalitas memperkuat pemahaman peserta tentang bagaimana legitimasi pemilu dibangun melalui proses yang transparan (Surbakti et al., 2020). Narasumber juga memaparkan tantangan lapangan, seperti persepsi negatif akibat misinformasi, keraguan terhadap hasil penghitungan suara, serta keterbatasan literasi politik masyarakat.

Integrasi perspektif informatika dan kepemiluan memperkaya wawasan peserta mengenai hubungan antara disinformasi digital dan delegitimasi pemilu. Hal ini sejalan dengan studi-studi terbaru yang menunjukkan bahwa misinformasi dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi dan hasil pemilu (Norris, 2014; Gunawan & Putri, 2022).

Isu Strategis yang Dibahas:

a. Polarisasi dan Diskursus Publik Tidak Sehat

Diskusi menunjukkan bahwa polarisasi politik tidak hanya dipengaruhi preferensi ideologis, tetapi juga struktur distribusi informasi digital. Algoritma media sosial memperkuat segregasi dengan mempersempit cakupan pandangan yang diterima warga (Sunstein, 2018). Hal ini berdampak pada menurunnya kualitas dialog publik dan meningkatnya konflik sosial.

b. Disinformasi dan Hoaks Politik

Peserta diperkenalkan pada pola produksi hoaks, motif penyebarannya, dan strategi verifikasi sederhana seperti pengecekan sumber, triangulasi informasi, dan pengecekan fakta digital. Edukasi ini penting mengingat hoaks politik terbukti berdampak signifikan pada opini publik (Lazer et al., 2018).

c. Rendahnya Pemahaman tentang Lembaga Demokrasi

Minimnya pengetahuan mengenai kewenangan KPU, Bawaslu, dan lembaga lain sering memicu mispersepsi. Pemaparan narasumber membantu meluruskan pemahaman tentang tugas, batas intervensi, serta mekanisme pertanggungjawaban penyelenggara pemilu.

d. Apatisme Politik Pasca Pemilu

Fenomena *information fatigue* atau kejenuhan informasi menjadi salah satu penyebab apatisme politik, terutama di kalangan usia produktif (Syahputra, 2021). Oleh karena itu, diperlukan strategi pendidikan pemilih yang lebih kreatif dan humanis, seperti penyampaian melalui media sosial, video pendek edukatif, dan komunitas berbasis minat.

e. Keadaban Digital (*Digital Civility*)

Keadaban digital diposisikan sebagai nilai dasar dalam memperkuat kohesi sosial. Microsoft (2023) mencatat bahwa tingkat risiko interaksi digital di Indonesia masih tinggi, sehingga latihan etika berkomunikasi di ruang virtual menjadi kebutuhan mendesak.

f. Pendidikan Demokrasi Lintas Generasi

Ketiga kelompok sasaran memiliki keunggulan berbeda: guru dalam aspek pedagogis, alumni sebagai jembatan komunitas, dan pensiunan sebagai sumber narasi historis.

Kolaborasi lintas generasi ini sejalan dengan literatur mengenai *intergenerational civic learning* (Checkoway, 2018).

Pendekatan Pembelajaran Demokrasi:

Materi memadukan nilai-nilai kewarganegaraan demokratis seperti berpikir kritis, keadaban digital, gotong royong, serta literasi politik berbasis pengalaman pasca pemilu. Pendekatan ini selaras dengan kerangka pendidikan pemilih yang dianut KPU: partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan (KPU RI, 2020).

Selain teori, peserta dilibatkan dalam praktik langsung berupa simulasi dialog demokrasi, penyusunan konten digital edukatif, serta pembentukan komunitas belajar nonpartisan. Model pembelajaran berbasis praktik ini terbukti efektif meningkatkan literasi demokrasi pada kelompok dewasa (Galston, 2019).

Dampak Kegiatan:

Evaluasi menunjukkan bahwa peserta memiliki antusiasme tinggi untuk:

- membangun ruang dialog rutin,
- mengembangkan program sosial kolaboratif,
- memproduksi konten literasi digital antihoaks,
- mengintegrasikan nilai demokrasi dalam pembelajaran di sekolah,
- memperkuat jejaring lintas generasi sebagai agen demokrasi.

Kegiatan ini efektif meningkatkan kapasitas komunitas sebagai aktor kunci demokrasi yang mampu menciptakan ruang publik yang lebih sehat, inklusif, dan berkeadaban.

4. Kesimpulan

Kegiatan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan yang dilaksanakan bersama komunitas Pangudi Luhur menunjukkan bahwa penguatan kualitas demokrasi tidak dapat diserahkan semata-mata pada momentum elektoral, melainkan membutuhkan proses edukasi politik yang berkelanjutan. Temuan kegiatan memperlihatkan bahwa masyarakat—khususnya kelompok lintas generasi—masih menghadapi tantangan serius berupa polarisasi digital, maraknya disinformasi, serta rendahnya literasi dan etika bermedia. Dalam konteks tersebut, integrasi perspektif akademik dari bidang teknik informatika dengan pengalaman praktis kepemiluan narasumber berperan signifikan dalam memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana teknologi, perilaku digital, dan dinamika politik kontemporer saling berkelindan dan memengaruhi kualitas demokrasi.

Program PkM ini berhasil meningkatkan kapasitas peserta sebagai bagian dari ekosistem warga aktif (*active citizens*) yang mampu menilai informasi secara kritis, berpartisipasi dalam diskursus publik secara beradab, serta berkontribusi pada terciptanya ruang digital yang lebih inklusif. Komunitas Pangudi Luhur, melalui kegiatan ini, menunjukkan potensi kuat sebagai agen demokrasi berbasis komunitas yang dapat menjembatani edukasi politik, nilai kebangsaan, dan literasi digital secara simultan.

Ke depan, pelaksanaan kegiatan serupa perlu diperkaya dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan lembaga pendidikan tinggi, komunitas warga, organisasi keagamaan, dan penyelenggara pemilu. Sinergi multipihak tersebut penting untuk memastikan bahwa pendidikan pemilih tidak berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi berkembang menjadi gerakan literasi politik-digital yang berkelanjutan, adaptif terhadap perubahan teknologi, serta mampu memperkuat demokrasi Indonesia agar semakin sehat, resilien, dan bermartabat.

Daftar Pustaka

- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). *Indonesia's 2019 Elections: Populism, Polarization, and the Contest for Democratic Quality*. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 38(3), 3–17.
- Hobbs, R. (2020). *Media Literacy in Action: Questioning the Media*. W.W. Norton.
- Kominfo & Katadata Insight Center. (2022). *Survei Indeks Literasi Digital Indonesia 2022*. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
- KPU RI. (2019). *Buku Saku Pendidikan Pemilih: Demokrasi dan Pemilu*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Lim, M. (2020). *Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and the Rise of Tribal Nationalism in Indonesia*. *Critical Asian Studies*, 52(4), 1–15.
- Nugroho, Y. (2023). *Digital Citizenship and Electoral Participation in Indonesia*. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 20(1), 45–62.
- Pariser, E. (2011). *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You*. Penguin Press.
- Pratama, A., & Anshari, M. (2021). Literacy for Resisting Disinformation: Evidence from Southeast Asia. *Information Development*, 37(4), 563–576.
- Surbakti, R. (2015). *Pendidikan Pemilih Berkelanjutan*. KPU RI Democracy Series.
- Utami, P. (2020). Hoaks Politik di Indonesia: Pola Penyebaran dan Penanggulangannya. *Jurnal ASPIKOM*, 5(1), 1–15.
- West, D. M. (2017). *The Future of Work: Robots, AI, and Automation*. Brookings Institution Press.